

# MOTIVASI INDONESIA MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN AUSTRALIA DI BIDANG EKONOMI DIGITAL

Oleh : Maulida

[maulidapulungan@gmail.com](mailto:maulidapulungan@gmail.com)

Pembimbing : Indra Pahlawan, S.IP. M.Si

Bibliografi : 16 Journal, 14 Books, 7 Official Documents, 15 Article/Website.

Jurusan Hubungan Internasional`

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## *Abstract*

*This study explains the motivation of Indonesia to collaborate with Australia in the field of digital economy. Increasing technological advances have changed human behavior in carrying out transactions both trade and financially. Indonesia's geographical conditions pose challenges in financial inclusion, Indonesia needs to learn a lot from Australia which has a more advanced financial technology infrastructure and a well regulated financial sector by the state.*

*This study uses the perspective of liberalism in international relations and is supported by foreign policy theory, this study uses the concept of international cooperation. This research is qualitative research with descriptive analysis method. The scope of research is financial technology cooperation in the field of digital payments.*

*The researcher made an answer stating that Indonesia's motivation to cooperate with Australia in the field of digital economy was because of the transfer of knowledge about financial technology which would have an impact on increasing the efficiency of payment instruments in electronic transactions.*

**Keywords :** *Indonesia, Australia, Digital Economy, Financial Technology, Efficiency, E-commerce.*

## PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas mengenai “Motivasi Indonesia Melakukan Kerjasama dengan Australia di Bidang Ekonomi Digital”. Penelitian ini ditinjau dari kajian Ekonomi Politik Internasional, yang merupakan konsentrasi penulis.

Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Kerjasama Indonesia dan Australia merupakan satu bentuk kepentingan nasional. Australia adalah sebuah negara Federal yang terletak di Benua Australia dan merupakan satu-satunya negara yang berada di Benua terkecil di dunia.

Ekonomi negara Australia merupakan negara maju dengan pendapatan perkapita yang tinggi yaitu sebesar US\$ 48.700,- dan angka kemiskinan yang sangat rendah. Sedangkan Pendapatan Domestik Bruto adalah sebesar US\$1.188 triliun dan menduduki urutan ke-19 sebagai negara dengan PDB terbesar di Dunia. Australia merupakan negara dengan infrastruktur yang maju dan perekonomian yang terus berkembang.

Indonesia dan Australia tetap menunjukkan semangat kerjasama yang ditegaskan dengan penandatanganan Deklarasi Kemitraan Kompherensif (*Comprehensive Partnership*) pada tahun 2005, yang intinya merupakan peningkatan kerjasama di berbagai bidang. *Indonesia-Australia Compherensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) merupakan kemitraan kempherensif kedua negara di bidang perdagangan barang, jasa, investasi serta kerjasama ekonomi untuk dapat bersama-sama menciptakan kekuatan ekonomi baru di kawasan.

Menteri perdagangan Thomas Lembong pada 15-18 Maret 2016 mengadakan kunjungan kerja ke Australia

dan menyatakan bahwa reaktivasi *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) akan berfokus pada sektor jasa dan ekonomi digital.<sup>1</sup> Mengikuti perkembangan teknologi dan informasi dalam era ekonomi digital, informasi bukan lagi sekedar media untuk bertransaksi dan berkomunikasi, melainkan menjadi sumber utama yang mendatangkan profit dalam perekonomian negara.

Konsep ekonomi digital muncul di dekade terakhir abad ke-20. Definisi Ekonomi Digital menurut *Encarta Dictionary* adalah “*business transactions on the internet the marketplace that exists on the internet*”. Yaitu transaksi pasar yang menitikberatkan pada internet.<sup>2</sup> Potensi ekonomi digital tidak terlepas dari penetrasi internet yang ada saat ini, pada tahun 2014 jumlah pengguna internet di dalam negeri sudah sebanyak 83.7 juta jiwa. Adanya ekonomi digital kebutuhan dasar yang hanya dapat di perdagangan dalam transaksi konvensional, kini sudah dapat dilakukan dalam bentuk perdagangan elektronik atau *e-commerce*.

Menurut Hoffman, dan Fodor, *e-commerce* dapat berjalan dengan baik apabila dijalankan berdasarkan prinsip 4C, yaitu: *connection* (koneksi), *creation* (penciptaan), *consumption* (konsumsi) dan *control* (pengendalian). Prinsip-prinsip ini dapat memotivasi konsumen pada *Return of Investment* (ROI) perusahaan, yang di ukur dengan partisipasi aktif seperti *feedback* atau *review* konsumen, dan *share* atau merekomendasikan kepada pengguna lain.<sup>3</sup> ROI merupakan rasio yang

---

<sup>1</sup>IA-CEPA focus sector jasa dan ekonomi digital Diakses melalui <http://m.antaranews.com/berita/551206/> (diakses pada 01 november 2018)

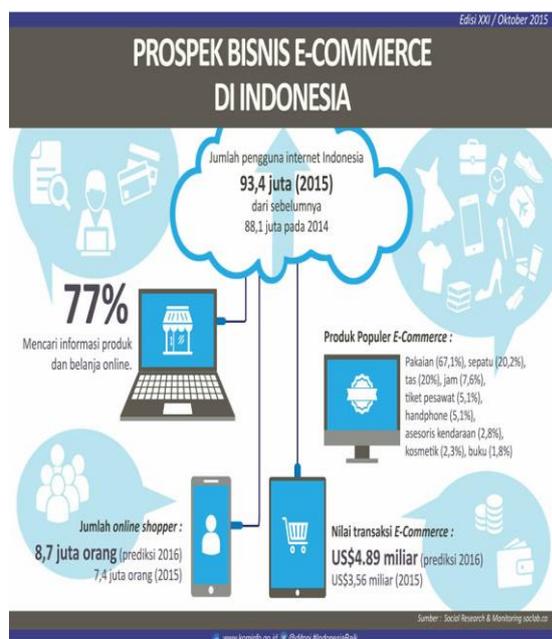
<sup>2</sup>*Digital Economics: Business Innovation Opportunities Through the Internet*. Diakses melalui <https://steemit.com/economics> (diakses pada 01 November 2018)

<sup>3</sup>Klarifikasi jenis-jenis *e-commerce* di Indonesia. Diakses dari

menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen.

Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet yang tinggi dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia menjadi peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya di bidang *e-commerce* karena internet menjadi salah satu faktor pendukung berkembangnya industri perdagangan elektronik di Indonesia. Prospek bisnis *e-commerce* di Indonesia berkembang sangat pesat ditengah perlambatan laju ekonomi tanah air, hal ini dapat dilihat dari data sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Prospek Bisnis E-Commerce di Indonesia**



Sumber: Social Research \$ Monitoring soclab.com. 2016

Dari data diatas, dapat dilihat pertumbuhan nilai penjualan bisnis online di tanah air akan terus meningkat karena dari total masyarakat Indonesia yang mencari informasi produk dan belanja online ada sekitar 77%. Transaksi *e-commerce* di Indonesia pada tahun 2011-

2015 juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Masyarakat menjadikan *e-commerce* sebagai gaya hidup.<sup>4</sup> Perilaku konsumtif dari puluhan juta orang kelas menengah di Indonesia menjadi salah satu indikator mengapa *e-commerce* di Indonesia akan terus berkembang, karena setiap tahunnya terjadi peningkatan terhadap nilai transaksi *e-commerce*.

Volume bisnis *e-commerce* pada tahun 2020, diprediksi akan mencapai USD 130 miliar dengan angka pertumbuhan pertahun sekitar 50%. Pemerintah Indonesia ingin menempatkan Indonesia sebagai negara *Digital Economy* terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Selain adanya *E-commerce Roadmap*, pemerintah menargetkan dapat menciptakan 1000 *technopreneurs* baru pada tahun 2020 dengan valuasi bisnis USD 10 miliar.<sup>5</sup> Pemerintah akan menggandeng mentor-mentor *technopreneurs* terkemuka, data center, *technopark*, serta memberikan pendanaan.

Indonesia menggandeng Australia untuk bekerja sama di bidang Ekonomi Digital, hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya MoU *Memorandum of Understanding* oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi dan Duta Besar Negara Australia untuk Isu Siber Tobias Feakin, di bidang Siber pada 31 Agustus 2018 di Istana bogor. Australia dan Indonesia akan memperluas kerja sama di sektor digital melalui inisiatif yang disampaikan Indonesia yaitu Indonesia-Australia Digital Forum pada tahun 2018 di Jakarta.

Australia saat ini sedang mengejar aturan dalam negosiasi perdagangan untuk

<sup>4</sup>Potensi Besar Untuk Pemasukan Negara. Diakses melalui <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6385/Potensi+Untuk+Pemasukan+Negara> (diakses pad 01 November 2018)

<sup>5</sup> *Indonesia Akan Jadi Pemain Ekonomi Digital Terbesar di Asia Tenggara*. Diakses melalui <https://kominfo.go.id> (diakses pada 02 November 2018)

PDFdownload.portalgaruda.org > article (diakses pada 01 november 2018)

menciptakan perdagangan digital yang konsisten, yang diprediksi dapat memberikan lingkungan yang stabil untuk berbisnis. Pemerintah Australia juga mengejar aturan untuk memfasilitasi perdagangan tanpa kertas dan transaksi elektronik di samping aturan privasi dan kerja sama keamanan *cyber* dan mendorong Indonesia dalam menggunakan teknologi. Tujuannya adalah untuk membuat perdagangan lebih efisien dengan menggunakan teknologi finansial yang nantinya akan mempermudah pembayaran transaksi *e-commerce*.

Indonesia sebagai negara yang berpotensi sebagai pemain *e-commerce* terbesar di Asia Tenggara tentunya akan melakukan kerjasama Australia yang dilihat sebagai negara dengan ekonomi digital yang lebih maju dari Indonesia, dalam kerjasamanya kedua negara menciptakan suatu forum untuk kerjasama dibidang tersebut yaitu IADF Indonesia Australia Digital Forum

Forum kerjasama digital kedua negara bertujuan untuk mengumpulkan lebih dari 500 warga Australia dan Indonesia yang bergerak di bidang *startup*, *financial technology*, kesehatan digital, *smart government*, keamanan digital dan industri kreatif. Sektor digital sudah menjadi penyumbang utama perekonomian Australia dan Indonesia.

## KERANGKA TEORI

### a. Teori: Interdependensi

Teori Interdependensi atau saling ketergantungan merupakan sebuah teori yang lahir dari perspektif liberalis yang terdapat dalam studi hubungan internasional. Liberalisme mempunyai asumsi bahwa modernisasi akan meningkatkan kadar interdependensi antar negara. Interdependensi mengacu pada situasi yang karakteristik, yaitu dengan adanya efek resiprokal

yang berbeda antar negara seperti arus barang dan jasa, manusia, uang dan informasi yang melewati batas negara.<sup>6</sup>Saling ketergantungan disebabkan oleh kerjasama yang saling dilakukan oleh dua negara atau lebih. Penjelasan tersebut bisa menjadi landasan bagi penelitian mengenai kerjasama bilateral kedua negara. Contohnya kerjasama ekonomi digital antara Indonesia dan Australia di bidang teknologi finansial. Kerjasama tersebut menyebabkan saling ketergantungan antara kedua negara, dimana kedua negara saling membutuhkan satu sama lain. Indonesia membutuhkan Australia untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan kerjasama peningkatan sumber daya manusia di bidang teknologi finansial, dimana Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi finansial.

Sementara itu Australia membutuhkan Indonesia untuk dijadikan sebagai pintu masuk Australia ke Asia Tenggara dalam mengeksport perangkat lunak teknologi finansial, Australia melihat bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara hal tersebut juga sejalan dengan misi Indonesia yaitu menjadi negara ekonomi digital terbesar. Dengan adanya kerjasama bilateral tersebut akan memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian negara. Pangsa pasar kedua negara juga memiliki perbedaan hal

---

<sup>6</sup> Anak Agung Banyu & Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006. H. 78.

tersebut menjadi potensi untuk kedua negara sama-sama mengambil peluang.

**b. Konsep: Kerjasama Internasional**

K.J. Holsti dalam bukunya *Politik Internasional* suatu kerangka analisis mengemukakan :

“Hubungan internasional dapat merujuk pada semua bentuk interaksi antara anggota masyarakat yang terpisah, apakah disponsori oleh pemerintah atau tidak, studi hubungan internasional akan mencakup analisis. Namun, kebijakan luar negeri atau proses politik antar bangsa kepentingannya dalam semua fakta hubungan antara masyarakat yang berbeda, itu akan termasuk juga studi atau perdagangan internasional, transportasi, komunikasi dan pengembangan nilai-nilai internasional dan etika”.<sup>7</sup>

Menurut K.J. Holsti dalam buku *Politik Internasional : Suatu Kerangka Teoritis*, ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya:

1. Demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya, dimana melalui kerjasama dengan negara lainnya, negara tersebut dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.

2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

Kerjasama internasional adalah salah satu usaha negara-negara untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang sama. Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi yang bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-institusi dan norma-norma yang efektif bagi unit yang berbeda secara kultur dan terpisah secara geografis, sehingga kebutuhan untuk mengatasi masalah yang menyangkut kurang memadainya informasi tentang motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai pihak sangatlah penting.

Kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Australia merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, melalui IA-CEPA (*Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) hubungan bisnis kedua negara akan semakin lancar karena pihak Indonesia maupun Australia telah menyepakati tariff bea masuk rendah hingga 0%.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>K J Holsti, *International Politics, A Framework for Analysis*, New Jersey, Prentice-Hall, 1992, hlm.10

---

<sup>8</sup>Negosiasi rampung, Indonesia-Australia sepakat kerjasama ekonomi diakses dari: <https://m.detik.com> (diakses pada 10 November 2018)

Keseriusan kedua negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital yaitu dengan dibentuknya *Indonesia-Australia Digital Forum* yang diharapkan akan memberikan dan memperluas kerjasama pemerintah di sektor digital dengan perluasan pasar dan peningkatan efisiensi pembayaran digital melalui teknologi finansial dengan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi serta menambah wawasan dan menciptakan ide baru.

### c. Perspektif: Liberalisme

Di dalam studi hubungan internasional, liberalisme adalah perpektif tandingan utama (*a rival perspective - a nemesis*) dari perspektif realisme. Kedua perspektif ini secara dominan telah mewarnai studi dan penstudi hubungan internasional, termasuk menjadi cikal bakal munculnya teori-teori hubungan internasional alternatif. Sebagaimana halnya perspektif tandingannya realisme, liberalisme tidak hanya membentuk teori-teori tentang politik internasional tetapi secara tradisional juga menawarkan berbagai preskripsi politik global (*global politics*).

Terdapat banyak tokoh yang dapat dikategorikan sebagai liberalis pendahulu. Salah satunya yaitu Adam Smith (1723-1790) yang pemikirannya berkembang terutama dalam ranah ekonomi. Salah satu pemikiran dasar yang diwariskan dari tradisi pemikiran Smith ialah adanya saling ketergantungan antara masyarakat dengan masyarakat, antara negara dengan negara sebagai bagian dari

*human nature*.<sup>9</sup> Bertolak dari sinilah berkembang dalam tradisi perspektif liberalism.

Dalam Perspektif liberalism berkembang suatu tesis saling ketergantungan terutama pada sektor ekonomi yang mendorong negara untuk tetap menjaga kerjasama, dan dengan begitu maka negara-negara akan mencegah diri dari situasi konfliktual yang mengarah ke situasi perang terbuka.

Indonesia dan Australia melakukan kerjasama dibidang teknologi finansial yang tumbuh sangat cepat di dunia, termasuk di Indonesia. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mencatat ada 165 perusahaan *fintech start-up* yang beroperasi di Indonesia.<sup>10</sup> Maka dari itu Indonesia perlu banyak belajar dari negara lain seperti Australia yang memiliki industri teknologi finansial yang sangat aktif dengan pertumbuhan jumlah perusahaan dari 100 perusahaan di tahun 2014 menjadi hampir 600 perusahaan saat ini.

*Fintech* dapat mendukung target inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah sebesar 75% pada 2019. Perkembangan dari inovasi industri *fintech* hadir dikarenakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, untuk membuka pasar baru bagi perbankan, serta pemerataan ekonomi yang diharapkan berujung dengan penurunan tingkat kemiskinan. Pemerintah Australia mendukung target inklusi pemerintah

---

<sup>9</sup>Vinsensio Dugi s,2016.*Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*.Surabaya: PT Revka Petra Media. Hal 55.

<sup>10</sup>*Kembangkan Fintech, OJK jalin Kerja Sama sebgan Komisi Investasi Australia* diakses melalui : <https://m.detik.com> > finance > moneter (diakses pada 10 N0vember 2018)

Indonesia. Keuntungan Australia dalam kerjasama ekonomi digital dengan Indonesia adalah adanya peluang untuk memperluas ekspor *Fintech*, Australia telah menandatangani kerjasama berbagi informasi dengan China dan Indonesia. Khususnya Indonesia Australia menjadikan Indonesia sebagai pintu masuk untuk memasuki pasar Asia tenggara. Australia melihat bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan perkeonomian terbesar se Asia tenggara, hal ini sejalan dengan visi dan misi negara Indonesia untuk menjadi negara dengan perekonomian digital terbesar dikawasan Asia Tenggara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kerjasama Ekonomi Digital Indonesia dan Australia di Bidang Teknologi Finansial

Dalam memudahkan pengawasan, *Fintech* dibagi kedalam empat jenis, yakni *crowdfunding* dan *peer to peer landing*, *market aggregator*, *risk and investmen management*, bidang *payment*, *settlement*, dan *clearing*. Dari empat jenis, OJK mengawasi *crowdfunding* dan *peer to peer landing*, sedangkan *payment*, *settlement* dan *clearing* masuk kedalam ranah Bank Indonesia lantaran sudah masuk pada proses pembayaran.<sup>11</sup>

Dalam sistem pembayaran *fintech* diatur oleh Bank Indonesia dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mendukung pertumbuhan pembayaran digital di Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan lebih berfokus kepada kerjasama sistem pembayaran digital yang di atur oleh OJK dan Bank Indonesia.

Pada tanggal 1 Desember 2017, Indonesia dan Australia meresmikan

kerjasama untuk mendorong pertukaran sumber daya manusia dan keahlian di antara kedua pasar industri teknologi finansial yang sedang tumbuh dan berkembang sangat pesat. Penandatanganan dokumen kerjasama disaksikan oleh Direktur Inovasi keuangan Otoritas Jasa dan keuangan (OJK) Indonesia, Fithri Hadi dan Wakil Kepala Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Internasional Australia, dan Thomas. Perjanjian kerjasama ini menjadi tahap penting bagi perkembangan dan pertumbuhan industri teknologi finansial bagi kedua negara.

Kerjasama ini memungkinkan tersedianya platform untuk memfasilitasi pertukaran sumber daya manusia, teknologi, permodalan dan penetrasi pasar bagi perusahaan tekfin kedua negara. Pemerintah Australia mendukung agenda Indonesia dalam mewujudkan inklusi keuangan dengan finansial teknologi.

Pertumbuhan usaha *fintech* sangat pesat di Indonesia, Indonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur keuangan yang aman, dan terjadi secara waktu nyata, serta terjadi lebih efisien dari sebelumnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat mengikutsertakan serta melayani sedikitnya 80 juta orang dan 49 juta usaha kecil yang belum masuk dalam sistem keuangan.

Keberlanjutan dari kerjasama kedua negara adalah dengan dilakukannya konferensi yang diselenggarakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rudiantara tujuan dari konferensi ni adalah untuk membuka are-area kerjasama baru dan membangun momentum bagi terhubungnya jejaring komersial Australia dengan ekosistem ekonomi digital Indonesia yang sangat dinamis dan bertumbuh pesat.

Tekfin Australia akan ambil bagian dalam Indonesia-Australa Digital Forum yang diadakan di Jakarta pada 31 Januari – 1 Februari 2018. Pada hari pertama akan fokus membahas mengenai *start-up* dan

---

<sup>11</sup> *ibid*

perkembangan *fintech* dan pada hari kedua akan berfokus mengenai perluasan pasar digital kedua negara.

### **Pertemuan Asosiasi Fintech Indonesia dan Australia pada Acara Indonesia-Australia Digital Forum, Jakarta**

Implementasi dari kerjasama tersebut adalah pembuatan *Fintech space*, selain itu *Fintech* Australia juga memberikan kesempatan berupa beasiswa yang dimenangkan oleh empat pengembang dan pelaku usaha asal Indonesia, yaitu DOKU, M-SAKU, Connector.id, dan Privy Identitas Internasional.<sup>12</sup>

Simont Cant selaku *Founding Partner of Fintech* Australia mengatakan dalam keterangan tertulis bahwa “Australia percaya kolaborasi antara asosiasi dapat mendukung kemajuan tekfin yang begitu pesat dan gelombang kebangkitan wirausaha di bidang tekfin yang begitu besar di Indonesia”.<sup>13</sup> Kolaborasi kedua negara diantaranya mencakup pertumbuhan dan peningkatan kapasitas para pemain pasar, pembangunan infrastruktur dan sistem keuangan yang aman, perlindungan konsumen, advokasi kebijakan yang mendukung perkembangan teknologi keuangan, serta mempromosikan inklusi keuangan ke masyarakat.

Kedua negara berkomitmen untuk berkolaborasi mencari solusi untuk masalah kritis, dan mendukung industri tekfin Indonesia. Direktur Eksekutif Kebijakan Publik, *Asosiasi Fintech* Indonesia, Ajisatri Sulaeman mengatakan, sejak tahun 2015, pertumbuhan tekfin di Indonesia sangat pesat dan peluang pertumbuhan industri tekfin di Indonesia masih terbuka lebar. Pemerintah Australia menyambut baik kerjasama ini dan mendukung perkembangan perekonomian

---

<sup>12</sup> Siaran Pers

NO.20/HM/KOMINFO/01/2018, Komitmen Kerjasama Pada Sektor Digital Melalui Indonesia-Australia Digital Forum (IADF). Diakses melalui <https://www.kominfo.go.id> (diakses pada 05 April 2019)

<sup>13</sup> *Ibid*

Indonesia, khususnya untuk mencapai stabilitas keuangan serta inklusi keuangan bagi masyarakat.

Bentuk nyata kolaborasi kedua asosiasi diwujudkan lewat penyelenggaraan “Expert Gym” sebagai bagian rangkaian acara Indonesia-Australia Digital Forum, sesi ini merupakan seminar rutin antara fintech Indonesia dan Australia, kedua negara juga akan bekerjasama mewujudkan *Fintech Space*, sebagai forum kolaborasi, industri tekfin untuk dapat bertukar gagasan, solusi, dan melahirkan inovasi-inovasi guna mempercepat pertumbuhan tekfin. Saat ini Indonesia sudah terdapat sebanyak 205 perusahaan tekfin yang bergerak aktif pada periode per Desember 2017. Potensi yang sama dimiliki Australia, dengan pertumbuhan aktif jumlah perusahaan tekfin dari 100 pada tahun 2014 menjadi 600 pada tahun 2018.<sup>14</sup>

Secara khusus, perjanjian ini mengikat kedua negara dalam membuka jalan bagi komunitas tekfin Australia, termasuk warga Indonesia yang saat ini bekerja di Australia, untuk membangun kemitraan dan membantu memecahkan berbagai tantangan industri di Indonesia, membuka kesempatan bagi para pengembang tekfin Indonesia untuk berpartisipasi dalam program magang dan bekerja di Australia, berbagi pengetahuan, data dan informasi, serta seputar kebijakan dan peraturan dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung ekosistem industri di kedua negara.

### **Pertemuan Asosiasi Fintech Indonesia dan Australia pada 30 November di Sydney**

Pertemuan yang diinisiasi oleh Komunitas Fintech Indonesia yang terdiri dari perwakilan regulator jasa keuangan,

---

<sup>14</sup>Yuliasuti, Desi. Indonesia Australia menggali fintech lewat kolaborasi. Diakses melalui <https://www.dignation.id/amp/read/01835/indonesia-a-australia-menggali-fitech-lewat-kolaborasi> (diakses pada 15 April 2019)

asosiasi, lembaga riset, dan 16 perwakilan perusahaan melakukan kunjungan ke Sydney dan Melbourne dalam rangka mengembangkan jejaring dan berbagi pengetahuan fintech masing-masing negara. Menurut CB Insight, Indonesia berkembang sebagai pusat fintech dan usaha rintisan (*start-up*) kedua terbesar di wilayah Asia Tenggara, hal tersebut dibuktikan dengan adanya 53 proyek investasi yang diprediksi akan selesai di tahun 2017. Total investasi start-up di Sembilan bulan pertama tahun ini senilai US\$ 3 miliar, naik dari US\$ 1,4 miliar di akhir tahun 2016.<sup>15</sup>

Pasar kedua negara sangat berbeda dan akan memberikan kesempatan besar untuk berinovasi jika kedua negara dapat bekerjasama lebih erat untuk membantu para perusahaan mengerti pasar masing-masing. Pertemuan ini akan berfokus pada isu inklusi keuangan yang menurut pemerintah Indonesia merupakan pilar utama dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Industri tekfin diidentifikasi menjadi salah satu potensi yang dapat mendorong inklusi keuangan, baik untuk dunia usaha maupun individual.

Dalam perjalanan ini, rombongan delegasi Indonesia melakukan kunjungan ke perusahaan start-up inkubator, Stone & Chalk, yang berlokasi di Melbourne.<sup>16</sup> Stone & Chalk merupakan pusat *fintech* terbesar di Asia dan sudah menjadi pusat gravitasi untuk *fintech* di Australia pada program inovasi, advokasi, dan kemitraan yang menyediakan bimbingan, jaringan dan dukungan ekspor layanan keuangan.

*Start-up* Indonesia mendapatkan kesempatan yang diberikan pemerintah Australia untuk belajar lebih lanjut

<sup>15</sup> Fintech Indonesia – Australia Visit. Diakses melalui (<https://fintech.id/events/fintech-indonesia-australia-visit/>)

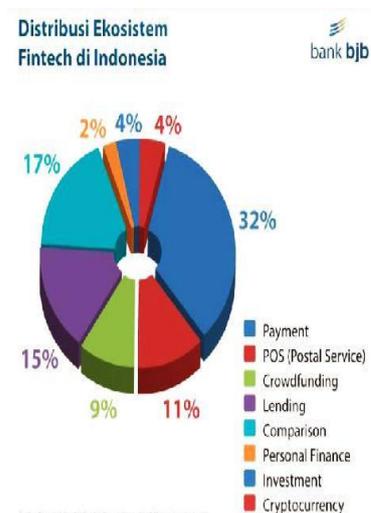
<sup>16</sup> Stone & Chalk supports Indigenous start-up initiative – Australia FinTech. Diakses melalui <https://australianfintech.com.au/stone-chalk-supports-indigenous-startup-initiative/> (diakses pada 02 Juni 2019)

mengenai *New Payment Platform*, yang memungkinkan seseorang melakukan pembayaran secara waktu nyata dan kaya data dalam upaya memnuhi kebutuhan ekonomi digital. serta *start-up* Indonesia akan dibimbing dalam memahami metode yang digunakan Australia dalam meminimalisir risiko dan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran yang mendekati, serta kaya data dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi digital.

### Sistem Pembayaran Digital Indonesia

Perusahaan *Fintech digital payment* memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara online sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat, dan murah. Dalam mekanismenya, dompet virtual ini akan diisi oleh konsumen melalui akun perbankannya. Dompet virtual akan terdapat sesuai dengan nominal yang ditransaksikan. Dalam melakukan deposit, dompet virtual ini bisa diisi melalui beberapa metode pembayaran, yaitu melalui kartu kredit, *mobile banking*, *internet banking*, ATM, kartu debit, *corporate internet banking*, *branchless banking agent*, *online virtual account*, dan *Electronic Invoice Presentment & Payment* (EIPP).

**Diagram 3.1 Distribusi Ekosistem Fintech di Indonesia**



Sumber: [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) 2018

Diagram diatas menggambarkan bahwa perusahaan fintech yang paling banyak berkembang adalah di bidang *Payment* atau Pembayaran yaitu sebanyak 32%. Dalam praktiknya di Indonesia, biasanya perusahaan *Fintech digital payment* bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk perusahaan telekomunikasi, *merchant*, toko maupun bankbank konvensional untuk dapat memberikan pelayanan transaksi online dengan lebih bervariasi. Untuk lebih memahami alur dari pembayaran digital dapat dilihat pada gambar dibawah ini.<sup>17</sup>

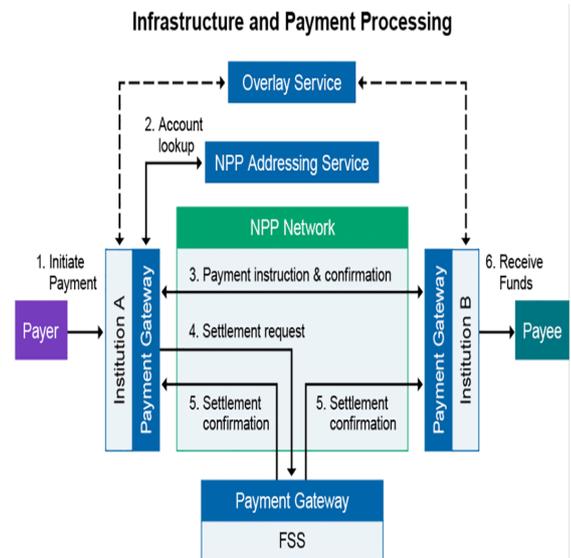
Proses dari pembayaran digital yaitu konsumen yang hendak melakukan transaksi harus melakukan proses registrasi transaksi melalui *platform digital payment*, selanjutnya konsumen dapat memilih cara pembayaran, perusahaan *Fintech* akan mengirimkan permintaan konsumen untuk diteruskan kepada bank agar dapat memproses transaksi. Selanjutnya bank akan mengirimkan pemberitahuan dan melakukan konfirmasi pembayaran kepada konsumen melalui platform *Fintech* dan konsumen melakukan konfirmasi transaksi dan platform *Fintech* akan menginformasikan transaksi tersebut.

### Sistem Pembayaran Digital Australia

*The New Payments Platform (NPP)* adalah infrastruktur pembayaran domestik terkemuka di dunia yang menawarkan pembayaran secara *real-time* 24 jam sehari dalam 7 hari seminggu. *New Payment Platform* adalah hasil kolaborasi industri intensif selama beberapa tahun, antara *Reserve Bank of Australia (RBA)* dan lembaga keuangan Australia untuk merancang dan membangun platform yang aman untuk layanan pembayaran domestik yang memenuhi kebutuhan ekonomi digital Australia. *New Payment Platform* Australia di luncurkan ke publik pada 13 Februari 2018, *Rwserve Bank of*

Australia adalah regulator untuk sistem pembayaran Australia

**Gambar 3.2 Pesan New Payment Platform dan Arus Informasi Antar Lembaga Keuangan Bank yang Terhubung Langsung dengan NPP.**



Source: RBA

Sumber: <https://www.nppa.com.au>2018

1. Pelanggan (pembayar) melakukan pembayaran melalui saluran perbankan seperti portal perbankan online atau aplikasi perbankan ponsel.
2. Jika pembayar telah memilih untuk menggunakan PayID untuk mengidentifikasi Penerima dana, lembaga pembayar akan mengirimkan pesan pertanyaan ke layanan pengalaman untuk menemukan penerima nomor rekening yang terhubung ke PayID.
3. Nama akun yang terkait dengan PayID dikembalikan ke pembayar untuk konfirmasi, yang akan membantu mengurangi terjadinya pembayaran yang salah arah dan penipuan.
4. Lembaga pembayar kemudian mengirimkan pesan dengan

<sup>17</sup> *ibid*

semua rincian pembayaran yang relevan, tunduk pada persyaratan layanan overlay, ke lembaga penerima pembayaran menggunakan gateway pembayarannya. Lembaga penerima pembayaran ini membersihkan pembayarannya dengan memeriksa perincian pembayaran dan mengirimkan tanggapan kembali ke lembaga pembayar melalui gerbang pembayarannya, dan mengonfirmasikan bahwa mereka dapat mengkreditkan tagihan.

5. Dengan kliring pembayaran lengkap, lembaga pembayar gateway secara otomatis memulai penyelesaian dengan mengirimkan permintaan penyelesaian ke FSS, yang tes bahwa lembaga pembayar memiliki dana kredit yang cukup, dan kemudian transfer nilai antara dua lembaga 'ESAs secara real time dengan secara bersamaan pendekan ESA dari lembaga pembayar dan mengkreditkan ESA dari lembaga penerima pembayaran.
6. FSS kemudian mengembalikan konfirmasi penyelesaian ke kedua institusi yang menunjukkan bahwa penyelesaian telah terjadi. Setelah konfirmasi penyelesaian diterima, para penerima pembayaran Adi membuat dana tersebut tersedia bagi nasabah penerima pembayaran.

*New Payment Platform* terdiri dari dua set yaitu Infrastruktur Dasar dan Layanan Penyelesaian Cepat. Infrastruktur Dasar NPP dioperasikan oleh SWIFT berdasarkan kontrak dengan NPPA. Ini mencakup jaringan SWIFT domestik baru

yang menghubungkan peserta satu sama lain dan ke Layanan Penyelesaian Cepat. Melalui gateway pembayaran di setiap peserta dan layanan penyelesaian cepat yang merutekan pesan berformat ISO 20022, yang merupakan standar global untuk pengiriman pesan keuangan yang fleksibel dan dapat diperpanjang dan memungkinkan pengiriman informasi pengiriman uang lebih kaya data dan lebih lengkap hingga 280 karakter data, di seluruh jaringan.

*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* atau SWIFT melakukan pengiriman pesan transaksi atau perintah secara aman antar lembaga keuangan bank atau non-bank. *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* SWIFT telah membuat pengaturan untuk memastikan infrastruktur pusat dipantau dan diamankan terhadap akses yang tidak sah oleh pihak ketiga.

Infrastruktur dasar juga memberikan inovasi baru dalam sistem pembayaran dimana peserta dapat mendaftarkan akun transaksi pelanggan ke pengidentifikasi atau yang disebut PayID, yang dapat berupa nomor telepon, alamat email atau nomor bisnis Australia, layanan ini memberikan konfirmasi nama akun penerima pembayaran ketika PayID. Jumlah pendaftar PayID baru saja mencapai 2 juta pada awal peluncurannya yaitu bulan februari, dan terus meningkat hingga bulan September yaitu mencapai 9 juta. Australia memiliki 25 juta penduduk dan volume bulanan dan nilai transaksi NPP telah tumbuh kuat.

Layanan penyelesaian cepat dikembangkan dan dioperasikan oleh *Reserve Bank*, yang mendukung penyelesaian pembayaran NPP antara ADI (*Authorized Deposito taking Institution*) yaitu lembaga pengambilan simpanan dalam waktu nyata. Hal ini dilakukan dengan menyediakan penyelesaian cepat, volume tinggi dari permintaan penyelesaian NPP individual yang

diterima dari infrastruktur dasar NPP di seluruh *Exchange Settlement Accounts* (ESA) dari *Authorized Deposit Institution*, dengan format pesan pembayaran untuk pembayaran cepat adalah ISO 20022.

*Exchange Settlement Accounts* adalah rekening yang disimpan di RBA oleh bank dan lembaga lain yang disetujui oleh RBA untuk penyelesaian kewajiban pembayaran satu sama lain. Sistem Informasi dan Transfer Cadangan adalah sistem pembayaran yang bernilai tinggi Australia, yang digunakan oleh bank dan lembaga lain yang disetujui untuk melunasi kewajiban pembayaran pengguna dengan basis penyelesaian secara *real-time*.<sup>18</sup> Penyelesaian akhir dan tidak dapat dibatalkan dicapai dengan mengkredit dan mendebit secara bersamaan akun Penyelesaian Exchange ESA yang diadakan di RBA.

Ketika permintaan penyelesaian untuk pembayaran diterima, *Fast Settlement Service* menguji pembayaran terhadap kriteria teknis dan untuk ketersediaan dana dalam ESA yang relevan. Jika pengujian ini berhasil, penyelesaian akan terjadi tanpa dapat dibatalkan dan tanpa syarat dalam waktu nyata. Keuntungan penyelesaian *real-time* dalam FSS adalah menghilangkan risiko kredit karena pembayaran diselesaikan dengan segera, memungkinkan ADI menyediakan dan kepada pelanggan mereka tanpa menimbulkan risiko kredit dan menghilangkan kebutuhan akan kontrol lain seperti pembatasan.

### **Peningkatan Efisiensi Dalam Sistem Pembayaran Digital Indonesia.**

Perdagangan elektronik berguna dalam meningkatkan efisiensi dan meningkatkan hubungan dengan kedua mitra bisnis dan pelanggan. Efisiensi

adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan, suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila ada perbaikan pada prosesnya, terjadi lebih cepat dan lebih mengurangi biaya. Dalam kerjasama Indonesia dan Australia dibidang ekonomi digital berpeluang untuk meningkatkan efisiensi dari pasar *e-commerce* Indonesia melalui alat pembayaran elektronik atau *fintech*.

### **Efisiensi Waktu**

Kerjasama Indonesia dan Australia dalam bidang ekonomi digital khususnya teknologi finansial sistem pembayaran, Indonesia memperoleh hasil seperti adanya transfer ilmu pengetahuan mengenai inovasi-inovasi baru dalam platform pembayaran Australia seperti layanan pengalaman baru PayID sebagai pengganti nomor rekening dalam transaksi digital.

PayID memberikan efisiensi seperti adanya pengurangan waktu dalam melakukan pembayaran yang artinya pembayaran dapat terjadi lebih cepat karena pelanggan hanya perlu memasukkan nomor telepon, alamat email atau nomor bisnis Australia sebagai pengganti nomor rekening. Di Indonesia pembayaran digital masih menggunakan nomor rekening yang rumit dan susah di ingat, belum lagi harus memasukkan kode bank apabila pengguna memiliki akun bank yang berbeda dengan pengguna lainnya. dengan adanya PayID maka akan berdampak kepada kemudahan dan proses pengiriman uang akan terjadi lebih cepat.

*Australia Business Number* dapat digunakan sebagai PayID, berfungsi sebagai penghubung ke rekening bank yang ditujukan untuk dana yang dikelola sendiri. Ketika pembayaran dilakukan untuk dana, ABN PayID dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa pembayaran dilakukan ke rekening bank yang benar.

---

<sup>18</sup>Exchange Settlement Account and Payment System. Diakses melalui <http://au.ccb.com/sydney/en/ggxx/201309181379492038.html> (diakses pada 01 Juni 2019)

Selain memudahkan, layanan PayID pada *New Payment Platform* membantu menghentikan beberapa penipuan yang terjadi karena pembayar yang melakukan pembayaran NPP menggunakan PayID akan dapat memeriksa nama penerima yang terkait dengan PayID yang telah mereka masukkan sebelum mengotorisasi pembayaran.<sup>19</sup> Fitur konfirmasi nama ini berpotensi untuk meminimalkan pembayaran yang salah arah, serta salah arah diarahkan ke penipu yang mengaku orang lain.

PayID dapat mengurangi beberapa kekhawatiran pelanggan penerima pembayaran karena harus berbagi informasi sensitif seperti no rekening, untuk memastikan tingkat keamanan tertinggi, pendaftaran informasi PayID dalam layanan pengalihan hanya dapat dilakukan oleh lembaga keuangan pelanggan. Lembaga yang mendaftarkan PayID diharuskan untuk mematuhi proses registrasi dan otentikasi yang kuat untuk mencegah pendaftaran PayID yang salah atau curang.

### **Efisiensi Anggaran Melalui ISO 20022**

Masyarakat secara keseluruhan bisa mendapatkan keuntungan dari efisiensi sistem pembayaran yang lebih cepat, solusi pembayaran elektronik mengurangi biaya operasi dan mempertahankan infrastruktur yang diperlukan untuk pembayaran berbasis kertas. Solusi pembayaran yang lebih cepat menggabungkan fitur keamanan canggih dan teknologi yang dapat menyebabkan kepercayaan publik yang lebih besar dalam sistem pembayaran dalam jangka panjang.

Bank melakukan pembayaran lintas batas, atau konsumen mengirimkan uang

ke luar negeri, solusi pembayaran yang lebih cepat dengan standar yang dapat dioperasikan secara global pada akhirnya dapat membantu memfasilitasi lebih cepat, lebih transparan, dan pembayaran lintas batas yang terjangkau.

Pembayaran lebih cepat dapat mempromosikan inklusi keuangan yang lebih besar dan mampu menjangkau pelanggan penyedia non-bank yang tidak dilayani dengan baik oleh bank. Penerimaan dana yang lebih cepat dapat membantu bisnis besar dan kecil untuk mengelola arus kas secara *real time* dan menghindari pembiayaan jangka pendek yang mahal. Bisnis juga akan mendapatkan keuntungan dari kepastian yang lebih besar sebagai pembayaran yang jelas dan menetap lebih cepat dengan finalitas. Selain itu, pembayaran yang lebih cepat dapat menyebabkan praktik atau layanan inovatif yang mungkin memungkinkan diferensiasi di antara kompetitor. Usaha kecil yang saat ini tidak menggunakan pembayaran elektronik juga bisa berpotensi menguntungkan dengan berpindah langsung dari cek kertas ke pembayaran real-time.

Pembayaran yang lebih cepat memiliki potensi untuk membantu bisnis mengelola keuangannya dengan lebih baik, melihat ke depan dan merencanakan waktu siklus. Dengan akses ke 24/7 pembayaran, pembayaran dapat diterima dan dibayar setiap saat terlepas dari zona waktu Australia, atau lokasi pemasok dan pelanggan. Arus kas yang lebih baik juga dapat mengurangi kebutuhan bisnis untuk menggunakan modal kerjanya untuk transaksi hari ke hari.

Dengan informasi lebih lanjut yang melekat pada pembayaran, rekonsiliasi Bank lebih cepat dan mengarah ke akun yang akurat. Debitur dapat dipantau secara waktu nyata dan pembayaran yang tertunggak segera ditindaklanjuti. Perangkat lunak akuntansi dapat

---

<sup>19</sup> Platform Pembayaran Baru dan Layanan Penyelesaian Cepat, diakses melalui <https://www.gov.au/publications/bulletin/2018/sep/th-e-new-payments-platform-and-fast-settlement-service.html>.

diintegrasikan ke dalam NPP untuk mengurangi transaksi manual.

Motivasi Indonesia melakukan kerjasama dengan Australia adalah untuk meningkatkan efisiensi dari pembayaran digital Indonesia, dengan adanya kerjasama dan pertemuan delegasi fintech Indonesia ke Australia maka ada banyak ilmu pengetahuan yang didapat oleh delegasi Indonesia seperti penerapan sistem pembayaran digital yang kaya data, dan terjadi secara cepat.

ISO adalah singkatan dari *The International Organization for Standardization*, yaitu Organisasi Internasional untuk Standardisasi yang menetapkan standar internasional di bidang industrial dan komersial dunia dimana tujuan pembentukannya untuk meningkatkan perdagangan antar negara-negara di dunia. Pengertian ISO adalah salah satu badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standardisasi nasional setiap negara untuk mengukur mutu sebuah organisasi. Artinya, setiap perusahaan yang ingin bersaing secara global dapat diukur kredibilitasnya dengan standar ISO.

Transaksi nontunai memerlukan standar format data, standar tersebut antara lain ISO 8583 yaitu transaksi nontunai dengan menggunakan kartu.<sup>20</sup> Sedangkan ISO 20022 adalah standar ISO untuk pertukaran data elektronik antar lembaga keuangan. Standar ini mencakup informasi keuangan ditransfer antar lembaga keuangan yang meliputi transaksi pembayaran, perdagangan efek dan informasi penyelesaian, transaksi kartu kredit dan debit serta informasi lainnya kedalam satu bahasa Markup eXtensible (xml).

---

<sup>20</sup> Yoyok Gamaliel, 2018. "Perancangan dan Implementasi Payment Gateway dengan Metode Concurrency untuk Transaksi Nontunai", Jurnal Telematika, vol. 12 no, 1.

ISO 20022 memberikan standar yang jelas untuk mengatur data, sehingga persyaratan data khusus dari jenis pembayaran yang berbeda dapat dengan mudah ditampung dalam satu format pesan standar. NPP menggunakan format pesan ISO, format pesan ISO 20022 dapat membawa informasi yang lebih kaya data dari 18 karakter saat ini tersedia untuk pembayaran *direct entry*.<sup>21</sup> Dengan lebih dari 1400 bidang data kliring ISO pesan data tambahan dapat dilakukan secara bersamaan dengan pembayaran.

Selain itu, standarisasi ISO 20022 yang digunakan Australia dalam *New Payment Platform* juga dapat menjadi studi kasus yang dapat di contoh oleh pemerintah Indonesia untuk segera mengadopsi ISO 20022 dalam sistem pembayaran. Karena sistem ISO 20022 dapat memberikan manfaat sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pembayaran diproses dan ketersediaan dana segera.
2. Data khusus untuk jenis pembayaran dapat terkandung dalam pesan pembayaran, mengurangi jumlah upaya rekonsiliasi manual yang diperlukan.
3. Sistem pembayaran mendukung inovasi berkelanjutan dan peningkatan layanan pembayaran.

---

<sup>21</sup> Explainer Document Development of NPP ISO 20022 message usage for Payroll, PAYG Tax and Superannuation Payments, 2019. Diakses melalui <https://www.nppa.com.au/wp-content/uploads/2019/02/Explainer-Documents-1.pdf>.

<sup>22</sup> Development of NPP ISO 20022 message usage for Payroll, PAYG Tax and Superannuation Payments, 2019. Diakses melalui <https://www.nppa.com.au/wp-content/uploads/2019/02/Market-Consultation-1.pdf>

4. Pelanggan mendapatkan informasi pembayaran yang mereka butuhkan dengan setiap pembayaran.
5. Layanan pembayaran mendukung proses bisnis pelanggan sendiri (seperti rekonsiliasi akun).
6. Sistem pembayaran memungkinkan layanan nilai uang ditawarkan kepada pelanggan, Pelanggan merasa mudah untuk menggunakan dan mengakses layanan pembayaran.
7. Sistem pembayaran ada di mana-mana, memungkinkan pembayaran dari siapa pun kepada siapa pun, Sistem pembayaran memfasilitasi pilihan dan persaingan dalam layanan pembayaran yang ditawarkan kepada pelanggan.
8. Sistem pembayaran tidak mencegah atau menghalangi keputusan pelanggan untuk mengubah penyedia layanan keuangan (beralih akun).
9. Dalam upaya meningkatkan efisiensi kegiatan pembayaran, sistem pembayaran Australia akan berupaya menyelaraskan dan memengaruhi pengembangan standar pembayaran global.

1. Mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk.
2. Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar.
3. Mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata di 17.000 pulau.
4. Meningkatkan inklusi keuangan nasional.
5. Mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah.

Fintech diharapkan dapat menjadi solusi untuk Indonesia, fintech dinilai sebagai salah satu element strategis untuk mewujudkan keuangan inklusif, dan sekaligus dapat menciptakan pembangunan berkeadilan bagi masyarakat kurang mampu dan tidak mendapat akses layanan jasa keuangan formal. Asosiasi Fintech Indonesia telah mendata bahwa ada sekita 140 pemain fintech di tahun 2016, diharapkan dengan semakin meningkatnya literasi keuangan masyarakat Indonesia, maka investasi jangka panjang dan penempatan modal pada berbagai sektor-sektor produktif dapat ditingkatkan.

## **Kepentingan Ekonomi dan Politik**

Teknologi Finansial merupakan suatu inovasi yang memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dengan layanan jasa keuangan dan memberikan dampak terhadap negara baik dari segi sosial, politik maupun ekonomi. Perkembangan dan potensi yang begitu besar membuat Bank Indonesia yang merupakan salah satu regulator keuangan yang mengurus *fintech* di bidang pembayaran mendirikan *fintech office* pada November 2016, yang dibentuk guna mengeluarkan aturan-aturan yang bertujuan mendorong pertumbuhan inovasi-inovasi dalam layanan jasa keuangan. Adapun *fintech* memberikan dampak ekonomi terhadap Indonesia yaitu:

Berdasarkan *survei Deloitte Consulting* dan Asosiasi Fintech Indonesia pada tahun 2016 terdapat tiga hal yang dapat mendorong penerapan *fintech* di Indonesia yaitu regulasi yang lebih jelas dan terarah, kolaborasi, dan literasi keuangan yang. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, keuangan inklusif merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.<sup>23</sup> Sasarannya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap

<sup>23</sup> Fintech: Instrumen Kolaboratif untuk Capai Pembangunan Inklusif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan. Diakses melalui [www.depkes.go.id/article/print/17052600001/fintech-instrumen-kolaboratif-untuk-capai-pembangunan-inklusif](http://www.depkes.go.id/article/print/17052600001/fintech-instrumen-kolaboratif-untuk-capai-pembangunan-inklusif).

layanan jasa keuangan. Sejalan dengan sasaran Rencana Pemerintah.

Target inklusi yang dicanangkan pemerintah melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI) sebesar 75 persen, dapat dicapai pada tahun 2019. Namun berdasarkan hasil survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2016 menunjukkan bahwa Indeks Inklusi Keuangan sebesar 67,82 persen, Bank Dunia menerangkan sekitar 49 juta unit UKM belum memiliki layanan keuangan, sementara dari (BPS) Badan Pusat Statistik mencatat pangsa kredit baru mencapai 35,5 persen dari PDB.<sup>24</sup> Kebijakan yang adaptif terhadap teknologi serta kemitraan dengan pihak swasta dan layanan jasa keuangan sangat diperlukan agar dapat berkontribusi terhadap target pemerintah untuk meningkatkan keuangan inklusi 75 persen.

Dalam kerjasama Indonesia dan Australia di bidang ekonomi digital khususnya fintech, Pemerintah Australia sangat mendukung kebijakan dan program Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan Indeks Literasi Keuangan dan Indeks Inklusi Keuangan melalui program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan yang bertujuan untuk penguatan kapasitas masyarakat dan UKM dalam mengakses pasar dan jasa keuangan.

Adapun kepentingan politik yang ingin di capai Indonesia adalah menjadi negara dengan kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia tenggara, dimana Indonesia saat ini sedang mengatur strategi serta telah membuat kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital khususnya di bidang *fintech*. Untuk mencapai misinya Indonesia menjalin kerjasama dengan Australia yang dinilai dapat membantu Indonesia untuk meningkatkan kualitas *fintech* Indonesia

dimata dunia. Kerjasama tersebut telah tertuang di dalam penandatanganan Mou dan kunjungan kerjasama yang dilakukan kedua negara.

## KESIMPULAN

Kerjasama ekonomi digital yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Australia tidak terlepas dari kepentingan Indonesia untuk mencapai misinya menjadi negara dengan kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Indonesia melihat bahwa Australia banyak memberikan manfaat dalam ekonomi digital salah satunya dibidang Teknologi Finansial, Teknologi Finansial Australia menjadi negara dengan regulasi keuangan terdepan dan teraman di dunia internasional. Disamping memiliki teknologi yang canggih Australia juga memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompeten.

Australia memiliki sistem teknologi yang memberikan efisiensi terhadap transaksi pembayaran digital, hal tersebut dibuktikan dengan metode yang diterapkan Australia untuk mempermudah dalam melakukan pembayaran melalui PayID, juga memungkinkan pembayaran secara cepat melalui *Fast Settlement Service* yang diatur baik oleh *New Payment Platform Australia*, pada Forum Kerjasama Ekonomi Digital Indonesia dan Australia telah menghasilkan kerjasama yang saling menguntungkan. Bagi Indonesia sendiri keuntungan tersebut datang dari adanya transfer ilmu pengetahuan di bidang teknologi finansial melalui penerapan sistem ISO 20022 pada *New Payment Platform Australia*.

Australia memiliki banyak keunggulan di bidang fintech, dalam *tech future* Australia melakukan inovasi-inovasi yang menguntungkan, selain itu Australia tetap mengedepankan perlindungan konsumen, menjaga privasi dan data, sehingga warga Australia tetap merasa aman disaat menjalankan kehidupannya secara online, hal inilah yang membuat

---

<sup>24</sup> *Ibid*

Indonesia termotivasi untuk menjalin kerjasama dengan Australia. Saat ini banyak masyarakat Indonesia belum memiliki kepercayaan saat menjalankan hidupnya secara online, diharapkan dengan adanya kerjasama ini kedua negara dapat saling berbagi mengenai metode dalam perlindungan konsumen.

Fintech dapat mendukung target inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah sebesar 75% pada 2019. Akses merata terhadap layanan keuangan juga diharapkan mampu mendorong masyarakat dalam memanfaatkan berbagai layanan untuk kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi dengan aman sehingga kesejahteraan dapat meningkat. Perkembangan dari inovasi industri fintech hadir dikarenakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, untuk membuka pasar baru bagi perbankan, serta pemerataan ekonomi yang diharapkan berujung dengan penurunan tingkat kemiskinan. Pemerintah Australia mendukung target inklusi pemerintah Indonesia.

Australia mendukung liberalisasi perdagangan dalam hal menghilangkan hambatan-hambatan dalam kerjasama. Selain itu, Australia memiliki infrastruktur yang lebih maju dibidang finansial teknologi. Hal tersebut dibuktikan dengan sektor perbankan yang diatur dengan baik dengan beberapa bank terbesar di dunia. Terlepas dari kekuatan finansial teknologi, Australia tidak memiliki pasar domestik yang ada di Amerika, China atau Inggris yang memungkinkan peningkatan skala yang berarti bahwa proposisi nilai utama daya tarik *Fintech* Australia adalah lokasinya sebagai penghubung untuk melayani pasar lokal, khususnya ASIA.

Keuntungan Australia dalam kerjasama ekonomi digital dengan Indonesia adalah adanya peluang untuk memperluas ekspor *Fintech*, ASIC telah mengupayakan perjanjian kerjasama lintas batas dengan negara yang memiliki sistem

keuangan yang maju seperti Inggris, Singapura dan Jepang serta menandatangani kerjasama berbagi informasi dengan China dan Indonesia. Khususnya Indonesia Australia menjadikan Indonesia sebagai pintu masuk untuk memasuki pasar Asia tenggara. Australia melihat bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan perkeekonomian terbesar se Asia tenggara, makadari itu hal tersebut menjadi peluang untuk Australia mengembangkan ekspor *fintech*nya kenegara-negara yang berada dalam kawasan Asia tenggara

### Referensi:

#### Jurnal, Working Paper:

Acep Rohendi, 2015. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-commerce perspektif hukum nasional dan internasional:", *Ecodemica*. Vol III No. 2.

Achmad Wirabrata, 2016. "Prospek Ekonomi Digital Bagi Peningkatan Pertumbuhan EKonomi", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. VIII, No. 17/IP3DI/2016.

Berry A Harahap, 2017. "Perkembangan Financial Technology terkait central bank digital currency terhadap transmisi kebijakan moneter dan makroekonomi", WP/2/2017.

Imam Lukito, 2017. "Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-commerce", Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Vol. 11 No. 3.

Imanual Adhitya Wulanata  
Chrismantianto, 2017. "Analisis SWOT Implementasi Teknologi

- Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 20 No, 01.
- Kannya Purnamahatty Prawirasasra, 2018. “Financial Technology in Indonesia: Disruptive or Collaborative. Report on Economics and Finance, Vol. 4,1018, No.2, 83-90.
- Maesy Angelina, 2018. “Menggali Potensi Teknologi Finansial”, Laporan Pulse Lab Jakarta
- Mahir Pradana, 2015. “*Klarifikasi jenis-jenis bisnis e-commerce di Indonesia, dalam jurnal neo-bis*”, Vol. 9, No. 2.
- Nidya Waras Sayekti, 2018. “*Tantangan Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia*”, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. X, No. 05/1/Puslit/Maret/2018.
- Australian Payments Network Milestones Report, 2018. Diakses melalui <https://www.auspaynet.com.au>
- Australia Tech Future, Department of Industry Innovation and Science diakses melalui <https://www.industry.gov.au>
- Ben Franzi, 2018. Inside Australian Online Shopping E-commerce Industry Paper. Diakses melalui <http://www.auspost.com.au>
- Government outlines agenda for Australia’s tech future-IT Brief Australia*, diakses melalui <https://itbrief.com.au>
- Joshua P. Meltzer, 2018. “ Digital Australia an Economic and Trade Agenda”, diakses melalui <https://www.brookings.edu/about-us/annual-report/>.
- New Payments Platform the Industry Approach to Minimising Real Time Payments Fraud, 2018. Diakses melalui <https://www.nppa.com.au/PDF>
- Yanyan Mochammad Yani, “ Perspektif-Perspektif Politik Luar Negeri: Teori dan Praktis”, diakses melalui <http://pustaka.unpad.ac.id>
- Buku:**
- Adi Nugroho, 2006. *E-Commerce, Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya, Informatika*, Bandung, hlm. 27-28.
- Adrian Sutedi, 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, Jakarta Timur, hlm 62.
- Departemen Internasional. 2017. *Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional. Departemen Internasional Bank Indonesia Menara Sjafruddin Prawiranegara*, Jl. M.H. Thamrin No. 2. Jakarta.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Psikologi Universitas Gadjah Mada. Hal 57
- Hidayat, Taufik. 2008. *Panduan Membuat Toko Online dengan OSCommerce*. Jakarta:Mediakita.Hal.5.
- James A. Robinson dan Richard C. Snyder, “*Decision-Making in International Politics*”, in Herbert C. Kelman, ed., *International Behavior:*

- A Social-Psychological Analysis*. New York, Holt, Rinehart and Winston, 1965, 433-463.
- Jones, Walter S. 1993. *Logika Hubungan Internasional*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kartasmita Koesnadi. *Administrasi Internasional*. (Bandung: LPSTIA. 1997 ) hal. 20
- Mohtar Mas' oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Displin dan Metodologi*. Jakarta: PT.Pustaka LP3ES Indonesia. Hal. 41
- Mochtar Mas' oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi*. Jakarta: LP3s.hlm 100
- Napitupulu Sarwin Kiko, Rubini Aldi Firmansyah, dkk. 2017. *Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta : Departemen Konsumen Perlindungan OJK
- Permanasari, Dian. 2019. *Ekonomi Kreatif outlook*. Jakarta Pusat
- Snyder et.al. dalam Rosenau, James N. 1969. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: The Free Press, hal. 199-205
- Vinsensio Dugi, 2016. *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya: PT Revka Petra Media. Hal 55.
- Dokumen Resmi:**
- Data Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, Outcomes Electronic Commerce
- Data Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, Outcomes Services.
- Data Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, Outcomes Skill Development.
- Data dari Kementerian Komunikasi dan Info: Usulan Desain, Prinsip, dan Rekomendasi Kebijakan Big Data, Kecerdasan Buatan, Blockchain, Teknologi finansial Indonesia.
- Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik ( Road Map E-commerce) Tahun 2017-2019. Diakses melalui <https://setkab.go.id>
- Laporan dari Negeri Kanguru – Australia. Mendag Fokus Pada Kerjasama IA-CEPA di Sektor Jasa dan Ekonomi Digital. Tersedia di [www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Skripsi**
- Alfauzi, Firdaus. Pengaruh Layanan E-payment Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia, Universitas Jember, 2018.
- Rahmandisyah, Marian. Kepentingan Australia Mengaktifkan Kembali Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) tahun 2016, Universitas Lampung, 2018.

## Artikel dan Website:

- AISS Mempererat kerjasama Ilmiah Indonesia dan Australia. Diakses melalui <https://www.aipi.or.id/fronted/news/read/556a74554d675533>
- Coworking hub The 11<sup>th</sup> to open in Melbourne to facilitate collaboration with Indonesia. Diakses melalui <https://www.startupdaily.net/2018/10/>
- Denok, 2017. “ Ekonomi Digital untuk Mendukung Kewirausahaan; diakses melalui <https://prasetya.ub.ac.id/berita/Darmian-Nasution-Ekonomi-Digital-Untuk-Mendukung-Kewirausahaan-19294-id.htm>
- Exchange Settlement Account and Payment System. Diakses melalui <http://au.ccb.com/sydney/en/ggxx/201309181379492038.html>
- Kerjasama Babak Baru Statistik Indonesia dan Australia. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/news/2018/07/12/202/kerja-sama-babak-baru-statistik-indonesia-australia.html>
- Majalah peluang. 2017. Urgensi Digitalisasi untuk koperasi. Fokus. Diakses melalui <http://www.majalahpeluang.com/>
- Muhamamd Alvin Abyan, Konsep Penggunaan Financial Technology dalam Membantu Masyarakat Sub Urban di Indonesia dalam Melakukan Transaksi Finansial. Diakses melalui <https://www.researchgate.net/publication/324386>
- Muliaman D. Hadad, 2017, Financial Technology (Fintech) Di Indonesia, Kuliah Umum Tentang Fintech – IBS, h. 3, URL : <http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20%20FinTech%20IBS%20June%202017.pdf>
- N. NurimanJayabuana, 2018. Perbedaan Fintech Indonesia dan Australia. Diakses melalui <https://www.m.bisnis.com/amp/read/20180201/105/733011/perbedaan-fintech-indonesia-dan-australia>
- Paket Kebijakan Ekonomi XIV : PetaJalan E-Commerce. Diakses melalui <https://www.ekon.go.id/ikliping/view/paket-kebijakan-ekonomi-xiv.2862.html>
- Siaran Pers: Kembangkan Fintech OJK Jalin Kerjasama dengan Australia Securities and Investmens Commission (ASIC). Diakses melalui <https://www.ojk.go.id>
- Siaran Pers No. 23 HM/KOMINFO/02/2018 Tentang Indonesia-Australia Digital Forum (IADF) 2018 Perkuat Kerjasama Digital. Diakses melalui <https://www.kominfo.go.id>
- Stone & Chalk supports Indigenous start-up initiative – Australia FinTech. Diakses melalui <https://australianfintech.com.au/stone-chalk-supports-indigenous-startup-initiative/>
- Tekfin Indonesia dan Australia Sepakat Lanjuti Upaya Bangun Ekosistem, diakses melalui [www.majalahict.com/35047-2/](http://www.majalahict.com/35047-2/)